

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam seni, budaya dan bahasa. Budaya Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai identitas negara. Indonesia memiliki keragaman budaya yang telah menjadi tradisi dari beragam suku di berbagai di Indonesia. Keragaman budaya tersebut memberikan warna keseluruhan yang lebih dinamis bagi budaya bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa, "Bhinneka Tunggal Ika". Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar (Putri, 2020). Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri, dalam aspek sosial atau budaya. Keragaman Indonesia juga tampak dari seni sebagai hasil kebudayaan daerah. Setiap daerah memiliki hasil karya seni yang berbeda dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Hampir semua daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki seni dan budaya yang berbeda. Beragam budaya yang tercermin di dalam beragam karya seni dan adat istiadat daerah benar-benar merupakan suatu kekayaan yang bisa dibanggakan karena tak banyak bangsa di dunia ini yang memilikinya.

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Sebagian memandang keanekaragaman budaya sebagai sesuatu hal yang positif karena bertujuan untuk berbagi kekayaan yang dikandung dalam tiap budaya di dunia, dan oleh karenanya, menyatukan kita semua melalui berbagai proses pertukaran dan dialog. Menjelaskan realita terkait eksotika kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu elemen penting yang dimiliki

negara ini sebagai salah satu kelebihan sekaligus keunikan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lainnya.

Dalam percaturan internasional, seni dan budaya memiliki peran penting sebagai sarana diplomasi. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Potensi besar kebudayaan Indonesia sebagai salah satu unsur dalam melakukan implementasi diplomasi kini bisa saja dijadikan sebagai modal utama dalam peningkatan hubungan kerja sama baik bilateral maupun yang bersifat *multilateral cooperation*. Sehingga dengan melalui aplikatif media budaya hal ini dianggap lebih responsif dalam membangun hubungan maupun interaksi dengan pihak lain. Namun Ketidakstabilan kondisi politik dunia internasional saat ini menuntut setiap negara di dunia harus dapat bersikap adaptif dalam menyikapi perubahan yang terjadi di dunia. Dalam kehidupan bernegara, penetapan setiap kebijakan dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara tentunya berkaitan dengan tujuan nasional dan kepentingan nasional yang ingin dicapai negara tersebut.

Kepentingan nasional tersebut yang menjadi landasan dalam perumusan *grand strategy* ataupun strategi keamanan nasional. Di mana keamanan nasional juga dipengaruhi oleh banyak faktor domestik seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dinamika politik, dan interaksi antar masyarakat. Keamanan nasional juga menjadi penting karena banyaknya potensi ancaman dari internal maupun eksternal yang mampu mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa (Jones & Jenne, 2021). Namun zaman sekarang ini, ancaman yang bersifat nir militer pun semakin menggeser potensi ancaman yang bersifat militer. Ancaman nir militer sekarang ini justru dirasa lebih marak. Oleh karenanya, tentunya pemerintah Indonesia telah memiliki cara guna menyikapi ancaman ninmiliter tersebut. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah dengan memaksimalkan *softpower* seperti diplomasi kebudayaan.

Diplomasi kebudayaan merupakan seni mengedepankan kepentingan nasional suatu negara dengan memanfaatkan aspek kebudayaan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam konteks konvensional, diplomasi memiliki sifat yang resmi. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, diplomasi kontemporer atau modern dapat dilakukan tanpa harus oleh negara, melainkan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, bahkan oleh individu terhadap individu. Fenomena hubungan Internasional selama ini didominasi oleh persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Akan tetapi, sejalan dengan kondisi dunia yang dianggap telah berada di era globalisasi, maka faktor kebudayaan tidak kalah pentingnya dikerjasamakan antar-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Maka dari itu Indonesia dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki yang telah dikenal di mata dunia melakukan diplomasi kebudayaan. Diplomasi melalui seni dan budaya dijadikan proses komunikasi dua arah yang melibatkan upaya untuk mempromosikan citra positif negara kepada masyarakat asing agar dapat memahami seni dan budaya (Kozymka, 2014).

Di era globalisasi ini, aktor non negara memiliki peran penting dalam penyebaran informasi termasuk budaya dan kesenian (Pajtinka, 2015). Dalam usaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara harus ditunjang dengan identitas diri yang baik, dan suatu citra positif yang didapatkan dari negara lain sebagai kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia, dalam upaya pencapaian kepentingan nasional diperlukan suatu pengenalan identitas diri untuk memperoleh *image* positif agar mendapatkan dukungan dari negara lain. Dengan citra positif yang dimiliki Indonesia, tentunya akan menjadikan pemerintah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam mencapai kepentingan nasional lainnya, termasuk dalam bentuk investasi jangka panjang yaitu menjembatani Indonesia dengan negara partner dalam memungkinkan kerja sama secara bilateral yang lebih jauh khususnya di bidang sosial budaya dan ekonomi

melalui *people to people contact*. Sehingga dalam pelaksanaan Diplomasi Kebudayaan, memerlukan manajemen modern serta dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan praktik hubungan internasional sekarang ini. Proses diplomasi kebudayaan, tidak hanya melibatkan para diplomat sebagai perwakilan pemerintah, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam upaya penyebaran nilai-nilai kebudayaan, peran pemerintah juga penting untuk membantu proses penyebaran budaya dengan mengeluarkan kebijakan nasional ataupun luar negeri terkait diplomasi budaya (Ang et al., 2015). Indonesia mempunyai diversifikasi budaya yang sangat tinggi yang mampu berperan penting dalam memperkuat sektor budaya di tingkat global, dalam hal ini Indonesia optimis untuk mengerahkan *softpower* yang dimilikinya. Di bawah Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia mengeluarkan program *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* sebagai instrument diplomasi kebudayaan. IACS merupakan program pemerintah dengan pemberian beasiswa seni dan budaya Indonesia kepada peserta dari negara lain untuk mengenal dan mempelajari seni, budaya, dan bahasa Indonesia.

Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS) telah diselenggarakan sejak tahun 2003 dimana pada awalnya program ini ditawarkan kepada dan diikuti oleh negara-negara anggota Dialog Pasifik Barat Daya (SwPD); Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Timor-Leste, dan tuan rumah Indonesia. Namun mengingat pentingnya dan keuntungan yang diperoleh dari program ini, beasiswa seni dan budaya Indonesia ini terus dijalankan dan diperluas selama bertahun-tahun untuk mencakup lebih banyak negara lainnya seperti negara-negara anggota ASEAN, ASEAN + 3, negara-negara PIF, serta banyak negara lain dari semua wilayah di dunia. Dan sejak IACS diadakan pada periode 2003 hingga 2019, beasiswa ini telah diberikan kepada 920 alumni dari 77 negara. Para alumni juga telah menjadi duta seni dan budaya Indonesia di mana pun

mereka berada (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Beasiswa ini diberikan kepada para peserta untuk memperdalam pemahamannya tentang seni dan budaya Indonesia yang akan ditempatkan di 6 titik pusat kesenian yang tersebar di wilayah Indonesia. Dan di akhir periode beasiswa ini, akan ada Indonesia Channel di mana peserta akan menampilkan hasil karya ketrampilan mereka yang telah dipelajarinya selama 3 bulan berada di pusat kesenian terkait. Sinergi antara teori dan praktik yang dibagikan di dalam dan di luar pusat seni diharapkan tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan pendorong untuk membentuk budaya dan norma-norma internasional, dan pada akhirnya akan memperkuat pemahaman dan kerja sama regional dan global pada tingkat *people to people contact* (TabloidDiplomasi, 2016).

Sebagaimana uraian penjelasan latar belakang di atas maka pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Indonesia mengimplementasikan *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* sebagai instrumen diplomasi kebudayaan dan keberhasilan dari *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* yang akan dijelaskan menggunakan Konsep Diplomasi Kebudayaan dan Konsep Kepentingan Nasional. Oleh karena itu, peneliti akan membahas penelitian ini secara lebih dalam dengan judul penelitian "*Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* sebagai instrumen Diplomasi Kebudayaan Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat di bahas dalam penelitian ini adalah "**Faktor-Faktor Apa Yang Melatarbelakangi Indonesia Mengimplementasikan *Indonesian Art And Culture Scholarship (IACS)* Sebagai Intrumen Diplomasi Kebudayaan?**"

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menggunakan beberapa teori yang berguna untuk menjelaskan analisis dalam penelitian agar mencapai tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu teori yang sering ditemui dalam kajian hubungan internasional. Kepentingan nasional sendiri mempunyai banyak arti yang didefinisikan oleh masing-masing ilmuwan dan peneliti. Dalam penelitian ini akan digunakan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan lebih lanjut tentang faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Indonesia mengimplementasikan *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* sebagai instrumen diplomasi kebudayaan.

Kepentingan nasional adalah setiap motivasi, tujuan utama dan sebab dari sebuah negara membuat kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya terlepas dari bagaimana identitas sebuah negara tersebut (Ozpek, 2014). Pengertian ini mempunyai makna bahwa kepentingan nasional merupakan sekumpulan pendapat yang datang dari berbagai sudut pandang yang kemudian menjadi satu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam konteks ini, kepentingan nasional juga berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara guna memenuhi kebutuhan domestik negaranya. Dengan demikian, kepentingan nasional menjadi isu yang sangat sentral mengingat bahwa kepentingan nasional merupakan akses kebutuhan dalam negeri yang kemudian terjabarkan pada kebijakan politik luar negeri.

Konsep Kepentingan Nasional merupakan elemen yang sangat vital, tanpa kepentingan nasional, integritas dan objektifikasi suatu bangsa tidak akan terproyeksi secara eksplisit. Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya yang

bertajuk *The International Relations Dictionary*, berpendapat bahwasanya kepentingan nasional merupakan sebuah unsur yang sangat mendasar dalam pembentukan suatu kebijakan nasional suatu bangsa. Dimana unsur tersebut mencakup keberlangsungan hidup bangsa dan negara(*self-preservation*), kemerdekaan(*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer(*military security*) dan kesejahteraan ekonomi(*economic well-being*)(Gallimore, 1990).

Unsur keberlangsungan hidup bangsa dan negara atau *Self-preservation* merupakan sebuah hak yang sangat hakiki dan esensial sebagai tujuan fundamental suatu negara. Kategori kepentingan nasional ini juga merupakan unsur vital bagi tujuan negara di seluruh dunia. Upaya mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara tentunya memiliki keterkaitan dengan harkat dan martabat atau citra bagi suatu negara yang berdaulat untuk kelangsungan jalannya suatu negara. Kemudian unsur kemerdekaan atau *Independence* merupakan faktor penting dari kepentingan nasional suatu negara. Dimana Kemerdekaan memiliki hubungan yang kuat dengan kemandirian suatu negara untuk dapat menjalankan jalannya sistem kenegaraan tanpa campur-tangan asing, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang pada akhirnya dapat mewujudkan sebuah pola pemerintahan yang stabil untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya. Kemudian unsur kesejahteraan ekonomi atau *Economic well-being* dapat dicapai melalui kebijakan publik yang memastikan bahwa masyarakat, individu, dan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan seputar keuangan, akses sumber daya ekonomi yang aman dan terjangkau, dan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan pembangunan asset dengan memberukan peluang untuk pekerjaan penuh yang terjamin dengan kompensasi dan manfaat yang memadai (CSWE, 2016). Unsur keutuhan wilayah atau *territorial integrity* merupakan unsur yang melekat dalam

kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara, dimana kepentingan utama dari integritas wilayah merupakan tentang penggunaan kekuatan dalam hukum internasional. Adapun beberapa penggunaan kedaulatan negara harus tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wood, 2021) Dan unsur keamanan militer atau *military security* merupakan keamanan negara untuk mempertahankan diri atau mencegah agresi militer yang mengacu pada kemampuan negara untuk menegakkan keputusan kebijakan negara menggunakan kekuatan militer. Keamanan sendiri diartikan sebagai kondisi yang dihasilkan dari tindakan perlindungan yang dipertahankan atau ditetapkan dimana kondisi tersebut tidak dapat diganggu dari tindakan atau pengaruh musuh. Keamanan militer suatu negara juga berasal dari negara dan lingkungan internasional yang melingkupinya, dimana kekuatan militer dapat digunakan untuk kolektif atau sebagai bentuk pertahanan diri dengan menggunakan persetujuan PBB sehingga setiap negara secara hukum dapat mempertahankan angkatan bersenjata mereka sendiri sebagai bentuk pertahanan dari pihak-pihak luar (Szpyra, 2014).

Oleh karenanya, melalui kepentingan nasional, beberapa kebutuhan dasar seperti kebutuhan ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan wilayah, kemakmuran, dapat terpenuhi. Namun tidak ada satu kebutuhan di atas yang dapat mempengaruhi kapabilitas suatu pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri (Coplin, 1970). Sehingga kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tujuan suatu negara dalam mencapai apa yang di cita-citakan negaranya dengan cara berpolitik, yang dapat dilakukan melalui diplomasi ataupun dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri. Sehingga apa yang menjadi tujuan dasar negara tersebut dapat tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh negara tersebut (Friedberg, 1990).

Tujuan nasional Indonesia sendiri telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang didasari pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional Indonesia inilah yang membuat mengapa akhirnya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri yang bersifat “bebas-aktif”. Sementara itu kepentingan nasional Indonesia berdasarkan buku putih pertahanan Indonesia ialah menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasar Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Tujuan nasional dan kepentingan nasional Indonesia secara umum telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Di samping itu, tentunya Indonesia tentunya memiliki tujuan nasional dan kepentingan nasional secara khusus, yaitu terkait jalinan hubungan antar negara di mana tugas dan tanggung jawab tersebut diamanahkan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kepentingan nasional khusus tersebut yaitu:

1. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang multilateral.
2. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerja sama kemanusiaan serta meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, dan komoditi.
3. Perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral.

Dalam penelitian ini, arah tujuan dari perumusan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu berharap agar

Indonesia dapat mencapai kepentingan nasionalnya yaitu yang mengenai peningkatan citra/*prestige* Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang multikultural, demokratis, toleran, dan menghargai keberagaman sehingga mendorong untuk dapat melakukan kerja sama sosial budaya dan ekonomi lebih lanjut.. Dalam konteks ini, Indonesia menggunakan keanekaragaman kebudayaan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mengerahkan *softpower* nya dengan melakukan diplomasi kebudayaan terhadap negara lain. Sehingga diplomasi kebudayaan ini digunakan sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mengenai peningkatan citra/*prestige* Indonesia di dunia internasional bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural, demokratis, moderat, toleran, dan menghargai keberagaman sebagai identitasnya sehingga mendorong untuk dapat melakukan kerja sama lebih lanjut di bidang sosial budaya dan ekonomi. Oleh karenanya program *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* ini adalah sebagai salah satu upaya dalam rangka pencapaian kepentingan nasional yang merupakan tujuan dari pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia. Dengan hal ini pula maka, diplomasi kebudayaan dapat digunakan sebagai cara guna mencapai kepentingan nasional.

Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS) merupakan suatu program yang dikeluarkan Indonesia sebagai salah satu kebijakan luar negerinya dengan memanfaatkan aspek kebudayaan yang dimiliki Indonesia sebagai instrumen diplomasi kebudayaannya. Dari konsep kepentingan nasional di atas, maka pada dasarnya kepentingan suatu bangsa dalam percaturan internasional tidak terlepas dari beberapa hal yang menjadi tujuan negara tersebut, dalam konteks ini yaitu untuk keberlangsungan hidup bangsa dan negara dengan peningkatan kesejahteraan Indonesia dan *prestige*. *Prestige* sendiri merupakan upaya

yang dijalankan oleh Indonesia untuk memperoleh *image* (citra) positif dari negara-negara luar, sehingga hal ini akan membangun sebuah kondisi yang membuat Indonesia lebih menonjol daripada negara-negara lain (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Hal inilah yang pada akhirnya membangun sebuah aspek ketertarikan bagi pihak-pihak luar yang kemudian merespons positif dan kemudian akan memberikan sebuah keuntungan (*profit*) bagi negara yang menjalankan kebijakan tersebut khususnya Indonesia. Untuk mencapai itu semua, maka pemerintah berusaha meningkatkan *prestige* negaranya dengan mengimplementasikan *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* untuk mencapai kepentingan nasional yang diinginkan yaitu mengenai peningkatan *prestige*. Karena setiap negara di dunia ini tentunya tidak ingin mendapatkan citra yang buruk di dunia internasional, melainkan setiap negara ingin dunia internasional memandang positif negara mereka dengan kelebihan yang ada.

Thomas Franck dan Edward Weisband menekankan pentingnya citra dan berpendapat bahwa Cara dua negara saling 'melihat' satu sama lain menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerja sama yang sistematis tidak mungkin berkembang di antara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai jahat, agresif dan tidak bermoral (Mas'ood, 1989).

Berdasarkan pernyataan pendekatan teori di atas maka dapat dipersepsikan bahwa kebudayaan merupakan peradaban manusia (*human civilization*) yang sebenarnya dapat diterima oleh berbagai kalangan dunia (Barston & Barston, 2019). Hal inilah yang mendorong terciptanya diplomasi kebudayaan untuk mendorong terrealisasinya kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi dalam bidang kebudayaan yang dilakukan pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memperluas wawasan publik melalui informasi yang diberikan, membangun citra Indonesia serta

mengurangi mispersepsi bangsa lain terhadap bangsa Indonesia sehingga diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif dalam kerja sama bilateral antarnegara.

Dalam usaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara harus ditunjang dengan identitas diri yang baik, dan suatu citra positif yang didapatkan dari negara lain sebagai kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia, dalam upaya pencapaian kepentingan nasional diperlukan suatu pengenalan identitas diri untuk memperoleh *image* positif agar mendapatkan dukungan dari negara lain. *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* yang dilaksanakan mulai tahun 2003 di yakini memiliki dampak yang besar terhadap Indonesia secara keseluruhan. Selain sebagai sarana promosi budaya, program beasiswa seni dan budaya ini dapat meningkatkan kerja sama bilateral yang lebih lanjut walaupun dalam jangka panjang.

2. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Dalam percaturan internasional, diplomasi merupakan sesuatu hal yang erat kaitannya dengan interaksi antar negara. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara terhadap negara lain melalui negosiasi cara-cara damai apabila mungkin, apabila cara-cara damai gagal mencapai tujuannya, maka diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara mencapai tujuannya. Sedangkan kebudayaan dalam artian makro diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diartikan milik diri manusia dalam suatu negara. Dalam artian mikro, kebudayaan biasanya termanifestasikan dalam pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Pendapat mengenai kebudayaan juga disampaikan oleh Zhu Majie dalam buku *The Role of Softpower in Internasional Relations*. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan dapat mempengaruhi cara

berpikir seorang aktor untuk mengambil sebuah keputusan yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan yang dianutnya (Majie, 2002.). Dengan kata lain, nilai-nilai dan norma perilaku dalam suatu kebudayaan yang dianut oleh seseorang, turut menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi langkah seseorang dalam menentukan sebuah keputusan (Ang et al., 2015). Dengan demikian, menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang* mengatakan bahwa Diplomasi Kebudayaan merupakan upaya suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro maupun makro seperti pendidikan dan ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lain-lain, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai ekonomi politik suatu negara (Warsito & Kartikasari, 2007).

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkup dari kebudayaan juga begitu luas, meliputi nilai-nilai hukum, keyakinan, seni dan bahasa, adat atau kebiasaan, moral, susila, dan juga keahlian. Diversifikasi kebudayaan yang dimiliki Indonesia terbentuk karena banyaknya suku bangsa dan ras yang menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa di tiap daerah tersebut memiliki karakter yang berbeda dalam aspek sosial ataupun keseniannya yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Keanekaragaman kebudayaan dipandang sebagai suatu hal yang bersifat positif karena dapat menyatukan banyak pihak melalui berbagai cara seperti proses pertukaran dan dialog. Potensi keberagaman kebudayaan yang dimiliki Indonesia tersebut menjadi salah satu aset penting yang mencerminkan identitas negara Indonesia. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu

“Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dimana hal tersebut menggambarkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, agama, budaya, dan bahasa yang terintegrasi dalam prinsip persatuan dan kesatuan (Kompas.com, Bhinneka Tunggal Ika: Arti dan Maknanya, 2019).

Divesifikasi kebudayaan Indonesia tentunya menjadi kekuatan negara yang memiliki ciri khas tersendiri yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan dapat memperkuat keberadaannya di tingkat global. Karena di zaman sekarang ini, faktor kebudayaan tidak kalah pentingnya untuk dapat mempengaruhi pengetahuan, gagasan, dan ide pihak lain meskipun budaya memiliki sifat yang abstrak (Adam B Masters, 2019). Terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang ini, sangat banyak cara yang dapat mempermudah dalam menebarkan pesona keberagaman budaya Indonesia ke tingkat global.

Dalam percaturan internasional, dewasa ini seni dan budaya memiliki peran penting dalam hubungan bernegara. Suatu negara kerap kali memanfaatkan seni dan budaya sebagai instrumen dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain. Hal ini sangat relevan apabila dikaitkan dengan konsep *Softpower*, menurut Joseph Nye, *softpower* ialah “*the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments*” (Nye, 2008). Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa *softpower* merupakan cara mencapai tujuan suatu negara yang dilakukan tanpa menggunakan unsur paksaan. Nilai-nilai kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan program *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* inilah yang dijadikan sebagai *point of attraction* dari upaya pengerahan *softpower* tersebut. Cara antar negara dengan negara lain melakukan interaksi biasanya berupa suatu bentuk diplomasi. Salah satu bentuk *softpower* yang bisa dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasionalnya ialah berupa diplomasi kebudayaan.

Diplomasi kebudayaan merupakan suatu upaya pengerahan *softpower* suatu negara. Diplomasi kebudayaan ini pada dasarnya bukanlah hal yang benar-benar baru, karena diplomasi kebudayaan telah beberapa kali disebutkan dalam berbagai literatur sebagai *Cultural Techniques in Foreign Policy* (Jr & Said, 1964). Jika ditelaah dari definisinya, diplomasi kebudayaan sendiri dapat dinyatakan sebagai usaha sebuah negara untuk mengedepankan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Dimensi kebudayaan ini mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian, hingga propaganda (Holsti, 1984.) Tidak hanya itu, dimensi lain seperti ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian dan lain-lainnya dalam percaturan masyarakat internasional juga termasuk sebagai unsur dalam diplomasi kebudayaan.

Kaitannya dengan diplomasi kebudayaan ialah bagaimana sebuah perilaku yang telah tertanam di dalam sebuah masyarakat tertentu dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan dicanangkan. Aspek budaya dalam dunia hubungan internasional terdapat dalam buku *Clash of Civilization* oleh Samuel Huntington. Di mana Samuel menjelaskan bahwa perbedaan paham ideologi dan identitas budaya sebuah negara mampu memercik konflik bagi dunia ini (Huntington, 1993). Aspek kebudayaan dalam hubungan internasional saat ini ternyata juga memiliki peran yang cukup kuat dalam menyatukan para aktor-aktor yang melakukan kerja sama di dalam hubungan internasional (Tsuchiya, 1986). Dengan pemahaman dan kemungkinan yang disebutkan sebelumnya, maka Indonesia melakukan diplomasi kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi akibat ketidaksepahaman diantara tiap-tiap negara.

Dapat disimpulkan bahwa diplomasi kebudayaan dilakukan sebagai upaya untuk menyebarkan pemahaman

melalui budaya dan membuatnya dikenal di kalangan internasional. Melaksanakan diplomasi kebudayaan sangat berarti dalam menanamkan, mengembangkan dan memelihara citra Indonesia di luar negeri sebagai bangsa dan negara yang berkebudayaan tinggi. Menanamkan citra positif yang baik bilamana belum ada, mengembangkannya di mana telah ada usaha untuk menumbuhkan citra tersebut, dan memeliharanya apabila di suatu tempat telah lahir suatu citra yang baik mengenai kebudayaan.

Diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh negara maupun non negara, individual maupun kolektif, maupun oleh *people to people contact* dalam tiap-tiap warga negara. Oleh karenanya, pola hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa dapat dilakukan oleh siapa pun sebagai aktornya, di mana sasaran utama dan tujuannya adalah mempengaruhi pendapat umum masyarakat negara lain baik ditingkat nasional maupun internasional. Sedangkan Instrumen diplomasi kebudayaan adalah segala hal secara makro maupun mikro yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya dalam suatu politik luar negeri. Secara teoritik, tujuan diplomasi kebudayaan adalah untuk memenuhi kepentingan nasional. Untuk menjelaskan hubungan antara situasi, bentuk, tujuan dan sarana diplomasi kebudayaan dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1. 1 Hubungan antar situasi, bentuk, tujuan dan sarana diplomasi kebudayaan

Situasi	Bentuk	Tujuan	Sarana
Damai	Eksibisi Kompetisi Pertukaran misi Negosiasi Konferensi	Pengakuan Hegemoni Persahabatan Penyesuaian	Pariwisata Olahraga Perdagangan Kesenian
Krisis	Propaganda Pertukaran misi	Persuasi Penyesuaian Pengakuan	Politik Media masa Diplomatic

	Negosiasi	Ancaman	Misi tingkat tinggi Opini public
Konflik	Terror Penetrasi Pertukaran misi Boikot Negosiasi	Ancaman Subversi Persuasi Pengakuan	Opini public Perdagangan Para militer Forum resmi Pihak ketiga
Perang	Kompetisi Terror Propaganda Embargo Boikot Blockade	Dominasi Penaklukan Dominasi Hegemoni Ancaman Subversi	Militer Para militer Penyelundupan Opini public Perdagangan Supply barang konsumtif

Sumber: Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, "Diplomasi Kebudayaan konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang".
Yogyakarta: Ombak, 2007, Hal 21.

Berdasarkan table diatas, *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* merupakan suatu program kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan dalam situasi damai dengan bentuk pertukaran misi, yaitu memberikan beasiswa seni dan budaya Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan citra positif dan menjalin persahabatan terhadap para partisipan dari negara lain melalui sarana kesenian yang tentunya tanpa adanya unsur kekerasan ataupun paksaan.

Dengan melaksanakan diplomasi kebudayaan, diharapkan akan dapat memupuk sikap saling pengertian, baik antara pemerintah RI dengan pemerintah asing maupun antara masyarakat kedua negara bersangkutan khususnya dalam penelitian ini yaitu antara peserta penerima beasiswa *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)*. Selain itu, Diplomasi melalui beasiswa seni dan budaya Indonesia atau yang sering disebut IACS, dijadikan proses komunikasi dua arah yang melibatkan upaya untuk mempromosikan citra positif negara kepada masyarakat asing agar dapat memahami seni dan budaya Indonesia. Di era globalisasi ini, di mana tiadanya batas-batas antar

negara selain dapat membentuk citra positif terhadap Indonesia, diplomasi kebudayaan dapat juga dijadikan salah satu cara untuk melestarikan dan mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia. Selain itu diplomasi kebudayaan yang dilakukan dalam menjalankan program IACS sebagai instrumennya adalah cara yang dilakukan Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain dengan memanfaatkan seni dan budaya Indonesia. Seni dan budaya Indonesia yang sangat beragam memiliki banyak nilai dan sangat menarik tentunya untuk dipamerkan kepada dunia internasional. Dengan adanya program IACS ini, Indonesia dapat mengedepankan kepentingan nasionalnya melalui instrumen seni, budaya dan bahasa Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dari diplomasi kebudayaan yang dilakukan.

Di bawah Kementerian Luar Negeri Indonesia, program *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* yang dikeluarkan oleh Indonesia sebagai instrumen dalam diplomasi kebudayaannya merupakan program pemerintah dengan pemberian beasiswa seni dan budaya Indonesia kepada peserta dari negara lain untuk mengenal dan mempelajari seni, budaya, dan bahasa Indonesia. Dalam upaya diplomasi ini, tentunya Indonesia memanfaatkan *soft power* sebagai jalan ninjanya. Dengan citra positif yang didapatkan oleh Indonesia membuat pemerintah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dalam mencapai kepentingan nasional, meskipun dalam bentuk investasi jangka panjang yaitu menjembatani Indonesia dengan negara peserta dalam memungkinkan kerja sama lebih jauh khususnya di bidang sosial budaya dan ekonomi, baik secara bilateral di tingkat regional maupun global.

Selain itu, diplomasi kebudayaan yang dilakukan dengan memanfaatkan *soft power* dalam pelaksanaan IACS tersebut, diharapkan dapat meningkatkan *people to people contact*. Dimana nantinya para peserta IACS diharapkan dapat mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada

orang-orang yang dikenalnya dimanapun mereka berada. Karena setelah selesai mengikuti program IACS, para partisipan akan otomatis menjadi Duta Seni dan Budaya Indonesia dimanapun mereka berada. Sehingga mereka berkewajiban untuk menjalankan tugas yang diembannya sebagai Duta Seni dan Budaya Indonesia untuk mempromosikan Seni dan Budaya Indonesia ketika mereka telah kembali ke negara masing-masing. Dengan meningkatnya *people to people contact* tentunya dapat meningkatkan pula pendapatan karena banyaknya pengunjung mancanegara yang tertarik untuk berkunjung ke Indonesia untuk sekedar berwisata, belajar, maupun bekerja.

D. Hipotesis

Hipotesis yang dapat di ambil dari pertanyaan **faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Indonesia mengimplementasikan *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* sebagai instrumen diplomasi kebudayaan**, adalah:

1. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia yang sangat beragam perlu untuk dilestarikan dan dipromosikan agar semakin dikenal oleh dunia Internasional ditingkat *people to people contact*.
2. Faktor Kepentingan Sosial Budaya dan Ekonomi
Kepentingan untuk peningkatan *citra/prestige* Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang multikultural, demokratis, toleran, dan menghargai keberagaman sehingga mendorong untuk dapat melakukan kerja sama sosial budaya dan ekonomi lebih lanjut.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan jangkauan penelitian yaitu pada tahun 2003 – 2019. Tahun 2003 adalah awal diadakannya program IACS ini,

dan sedangkan tahun 2019 adalah batasan peneliti untuk menganalisis *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)*.

F. Metodologi Penelitian

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode atau cara dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mendukung referensi dari penelitian yang telah dibuat. Metodologi ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang dan sejarah isu yang akan diteliti. Dari gambaran kejadian akan dilakukan analisa secara periodik dengan data yang di dapatkan. Adapun tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada alasan Indonesia menjadikan *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* sebagai instrument diplomasi kebudayaan.

2. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa literatur seperti skripsi, tesis, jurnal artikel, buku, peraturan perundang-undangan, website, dan berbagai sumber online lainnya yang berhubungan dengan dipomasi kebudayaan Indonesia melalui *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan yang memanfaatkan referensi dan sumber berupa artikel, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan berbagai referensi offline maupun online. Pendekatan kepustakaan ini juga menggunakan analisa

mengenai tujuan dilakukannya diplomasi kebudayaan melalui *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi literatur dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Beberapa studi literatur yang digunakan berasal dari website resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tabloid Diplomasi Indonesia, website lainnya dan beberapa berita yang berhubungan dengan topik penelitian.

G. Sistematika Kepenulisan

Sistematika dalam kepenulisan ini terdiri dari empat bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Keempat bab tersebut yaitu sebagai berikut:

BAB I

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai daftar isi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika kepenulisan.

BAB II

Bab kedua akan menjelaskan mengenai program diplomasi kebudayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

BAB III

Bab ketiga akan menjelaskan mengenai gambaran program *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)* dan keberhasilan yang diperoleh dari program *Indonesian Art and Culture Scholarship (IACS)*.

BAB IV

Pada bab terakhir dari penelitian ini akan berisikan tentang kesimpulan dan jawaban akhir rumusan masalah dari penelitian ini.